

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Para investor dan kreditur sebelum menanamkan dananya pada suatu perusahaan akan selalu melihat terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, analisis dan prediksi atas kondisi keuangan suatu perusahaan adalah sangat penting (Husnan, 2001: 65). *Financial distress* adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi di mana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Istilah umum untuk menggambarkan situasi tersebut adalah kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang, dan *default* (Darsono dan Ashari, 2005: 78).

Menurut Platt dan Platt (2002: 89) dalam Atmini (2005: 56, *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai antara lain dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi *financial distress* ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan ataupun likuidasi. Kegagalan berbagai perusahaan di seluruh dunia dalam mencapai tujuan yang diharapkan, atau bahkan untuk dapat bertahan dalam dunia usaha, seringkali dikaitkan dengan struktur *corporate governance* yang

diterapkan perusahaan (Ellomi dan Gueyie, 2001). *Corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Forum *Corporate Governance in Indonesia*, 2002: 123).

*Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007: 73).

Menurut Tarmidi (1999), Indonesia pernah mengalami permasalahan *Corporate governance* yang menarik perhatian untuk dikaitkan dengan kesulitan keuangan sejak krisis finansial pada tahun 1997. Banyak para ahli berpendapat kelemahan di dalam *Corporate governance* merupakan salah satu sumber utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara di Asia (termasuk Indonesia) pada tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001).

Terdapat lima mekanisme *corporate governance* yang akan dikaji dalam studi ini yang meliputi dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Dewan direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Pengujian pengaruh dewan direksi dan financial distress telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, studi yang dilakukan oleh Mayangsari & Andayani (2015) pada variabel ukuran dewan direksi dan *financial distress* menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Penelitian (Emrinaldi, 2007: 235) menyatakan semakin besar jumlah dewan direksi, semakin kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan.

Selain dewan direksi, dewan komisaris juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Peran ini menjadi semakin penting setelah terjadinya beberapa *white collar crime* yang melibatkan pimpinan perusahaan pada jenjang tertinggi (Muntoro, 2006: 56). Oleh sebab itu, tugas dewan komisaris menjadi sangat penting dalam mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan itu sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dewan komisaris juga dituntut untuk dapat memberikan nilai pada perusahaan dan harus dapat memberikan manfaat pada *stakeholder*. Studi Deviacita dan Ahmad (2012: 78), menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris maka akan semakin meningkatkan monitoring atau pengawasan kinerja perusahaan yang dampaknya rendahnya kemungkinan kondisi *financial*

*distress*. Namun, hasil studi Mayangsari & Andayani (2015) menunjukkan hasil yang berbeda dimana ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *financial distress*

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya adalah komite audit. Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik, komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Bapepam melalui surat edaran No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantudewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Komite audit lebih lanjut diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit.

Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI, 2002). Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang baik penting dalam

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan.

Komite audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bertindak mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Efektivitas kinerja dari sebuah komite audit dapat diukur melalui karakteristik-karakteristik yang dimiliki antara lain ukuran, independensi, aktivitas dari komite audit, dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit. Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas dari komite audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun. Sedangkan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan. Melalui karakteristik komite audit yang baik diharapkan akan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kesulitan keuangan (*financial distress*) (Pembayun & Januarti, 2012). Mayangsari & Andayani (2015) pada variabel ukuran komite audit dan *financial distress* menunjukkan bahwa ukuran komite audit terbukti berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *financial distress*.

Kepemilikan manajerial merupakan saham-saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan seperti komisaris, direktur dan direksi. Peningkatan proporsi saham yang dimiliki oleh komisaris, direktur dan direksi dipercaya bisa meningkatkan atau memperbaiki kinerja perusahaan yang nantinya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan juga. Studi yang dilakukan oleh Hastuti (2014) pada variabel kepemilikan dan *financial distress* menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress* namun, studi yang dilakukan oleh studi yang dilakukan oleh Mayangsari & Andayani (2015: 89) dan Widyasari (2012: 67) pada variabel kepemilikan manajerial dan *financial distress* menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *financial distress*.

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi atau lembaga-lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan bank. Besarnya proporsi saham yang dimiliki pihak institusional sangat berpengaruh terhadap kinerja dari manajemen yaitu dengan memberikan motivasi lebih kuat untuk meningkatkan aktivitas perusahaan sehingga berdampak pada laba yang diperoleh dan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Studi yang dilakukan oleh Mayangsari & Andayani (2015) dan Putri & Merkusiwati (2014: 105) pada variabel kepemilikan institusional dan *financial distress* menunjukkan bahwa kepemilikan institusional terbukti berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan pada studi Widyasari (2012: 56) dan Kristanti & Syafruddin (2012: 76) menunjukkan

bahwa kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian Andina (2016) meneliti tentang efek dari *corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang pernah mendapatkan laba negatif selama tahun 2011 hingga 2015. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, kepemilikan institusional. Persamaan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur textile dan garment yang terdaftar di Bursa efek periode 2011-2015. Berdasarkan kesimpulan penelitian terdahulu maka penulis mengambil judul “ **Pengaruh *corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan Textil dan Garment Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.** Penelitian ini mengacu ke penelitian yang dilakukan Andina, 2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Andina, 2016. adalah pada penambahan Variabel Dewan Direksi sebagai salah satu variabel independen, dan perbedaan lain yaitu pada periode tahun penelitiannya. Perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur di sektor property, konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sedangkan dalam penelitian ini meneliti perusahaan selama periode tahun di tahun 2011-2015.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sistem peringatan awal untuk mengantisipasi adanya *financial distress* penting untuk dikembangkan karena akan sangat bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Peringatan ini memberikan signal kepada pihak internal perusahaan agar lebih cepat dalam mengambil tindakan yang mana akan dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan. Pihak eksternal pun dalam hal ini akan dapat terbantu dalam proses pengambilan keputusan apakah akan berinvestasi atau tidak pada perusahaan tersebut. Selain itu, kajian mengenai *financial distress* masih menarik untuk diteliti mengingat pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* yang telah diteliti pada penelitian terdahulu belum konklusif. Oleh sebab itu, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Masih adanya perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress*”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *financial distress*?
2. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap *financial distress*?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress*?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress*?



### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris dengan melakukan kajian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *financial distress*
2. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *financial distress*
3. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap *financial distress*
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress*
5. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress*

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan mengenai *agency theory* dan *corporate governance* serta konsekuensinya terhadap *financial distress*.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai pengaruh *corporate governance* dan *financial distress* terutama pada perusahaan yang telah memisahkan antara kepemilikan dan pengendalian.
3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini juga bermanfaat kepada para pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan konsep *Good Corporate Governance*. Temuan penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami mekanisme *corporate governance*, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.